

Perancangan Blok E (Mal Pelayanan Publik dan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik) dengan Pendekatan *Transparent Office* di Pusat Pemerintahan Agam Tuo Nagari Balingka

Fadhilah Lika Efela¹⁾

Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,
Universitas Bung Hatt fadhilahefela@gmail.com

Al Busyra Fuadi²⁾

Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,
Universitas Bung Hatta albusyrafuadi@bunghatta.ac.id

Ariyati³⁾

Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,
Universitas Bung Hatta ariyati@bunghatta.ac.id

ABSTRAK

Perancangan Blok E pada pusat pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Agam dilatarbelakangi oleh kebutuhan fasilitas terpadu akibat pemekaran wilayah. Blok ini difungsikan untuk menampung Mal Pelayanan Publik dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) yang berperan penting dalam penyelenggaraan administrasi dan layanan masyarakat. Tujuan utama perancangan adalah menghadirkan gedung dengan fungsi ganda, yaitu sebagai pusat administrasi sekaligus ruang publik inklusif yang mampu meningkatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Konsep *transparent office* dipilih untuk mengubah citra kantor pemerintahan yang umumnya tertutup menjadi lebih terbuka, komunikatif, serta nyaman bagi pengguna.

Metodologi perancangan meliputi analisis tapak, kebutuhan ruang, sirkulasi, struktur, dan utilitas. Konsep desain mengedepankan keseimbangan antara ruang privat dan publik melalui penggunaan struktur bore pile dan beton bertulang yang kokoh, serta sistem utilitas bawah tanah meliputi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan proteksi kebakaran. Hasil perancangan menunjukkan bahwa penerapan *transparent office* efektif dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, efisien, dan transparan. Selain itu, desain ini memperkuat peran kantor pemerintahan tidak hanya sebagai pusat layanan administratif, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial yang modern, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Kata Kunci: Blok E, Mal Pelayanan Publik, Kesbangpol, *transparent office*, pusat pemerintahan.

ABSTRACT

The design of Block E in the government center of the New Autonomous Region (DOB) of Agam Regency is motivated by the need for integrated facilities following regional expansion. This block is designated to accommodate the Public Service Mall and the National Unity and Political Agency (Bakesbangpol), both of which play an essential role

in administration and public services. The main objective of the design is to create a dual-function building, serving as an administrative center while also acting as an inclusive public space that enhances interaction between the government and the community. The transparent office concept was chosen to transform the conventional image of government offices, which are generally closed, into spaces that are more open, communicative, and comfortable for users.

The design methodology includes site analysis, space requirements, circulation, structure, and utilities. The design concept emphasizes a balance between private and public spaces through the use of bore pile foundations and reinforced concrete structures, supported by underground utility systems covering electricity, clean water, telecommunications, and fire protection. The design results show that the application of the transparent office concept is effective in creating a healthy, efficient, and transparent work environment. Moreover, this design strengthens the role of government offices not only as administrative service centers but also as modern, inclusive social interaction spaces oriented toward public service.

Keyword: Block E, Public Service Mall, Bakesbangpol, Transparent Office, Government Center.

PENDAHULUAN

Pemberlakuan Otonomi Daerah sejak tahun 2001 telah mendorong lahirnya berbagai Daerah Otonomi Baru (DOB) di Indonesia sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah (*Tulisan-Hukum-PEMBENTUKAN-DAERAH-OTONOMI-BARU*, n.d.). Berdasarkan peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 129 tahun 200 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah pada pasal 2 yang menyatakan bahwa tujuan pemekaran adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepat pertumbuhan kehidupan demokrasi, pembangunan perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, serta peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Dalam sebuah Daerah Otonomi baru tentu dibutuhkannya sebuah pusat pemerintahan. Pusat Pemerintahan merupakan lokasi perkantoran untuk semua kepentingan – kepentingan per orangan maupun kelompok (swasta), anggota legislative, dan kantor pemerintahan (Shabrina Alfari, n.d.).

Salah satu daerah yang tengah dipersiapkan adalah Kabupaten Agam Tuo di Provinsi Sumatera Barat, dengan Nagari Balingka, Kecamatan IV Koto sebagai pusat pemerintahannya. Kabupaten Agam membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran wilayah yang telah disepakati pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Agam pada 19 Maret 2024 lalu (*Agam Dimekarkan, Agam Tuo Bakal Jadi Kabupaten*, 2024). Pemekaran ini dilatarbelakangi oleh luasnya wilayah Kabupaten Agam, meningkatnya jumlah penduduk, serta kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan terjangkau bagi masyarakat. Sebagai konsekuensi dari pembentukan DOB, direncanakan pembangunan pusat pemerintahan terpadu yang mampu menampung berbagai instansi strategis. Salah satunya adalah perancangan Blok E, yang akan difungsikan sebagai wadah bagi Mal Pelayanan Publik dan juga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Namun, perancangan gedung perkantoran pemerintahan sering menghadapi permasalahan, antara lain kurangnya transparansi ruang, ketidakjelasan alur pelayanan, serta keterbatasan akses publik. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya kualitas pelayanan dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian ini mengusung pendekatan transparant office. Pendekatan ini menekankan keterbukaan secara fisik melalui desain ruang terbuka dan material transparan, sekaligus keterbukaan sistem pelayanan agar lebih jelas, efisien, dan mudah diawasi publik.

LITERATUR

Daerah Otonomi Baru

Secara etimologis, istilah otonomi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu “autonomy” yang berarti sendiri dan “nomous” yang berarti hukum atau aturan. Otonomi daerah mengacu pada prinsip yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang memberikan hak, kewenangan, dan tanggung jawab kepada daerah otonom untuk mengelola dan mengurus pemerintahan serta kepentingan wilayahnya secara mandiri.

Menurut KBBI, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Daerah Otonom adalah sarana yang mewadahi semua perbedaan (sosial,ekonomi,budaya) dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika.

Pusat Pemerintahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya(KBBI, 2024a).Pusat Pemerintahan adalah kawasan yang dirancang khusus sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan secara terpusat. Pusat Pemerintahan didefinisikan sebagai tempat yang menjadi kedudukan utama pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan kawasan didefinisikan sebagai wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya

Pusat Pemerintahan adalah tempat dimana segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan dapat dilakukan, baik itu kegiatan administrative dan politik, serta semua kegiatan yang berkaitan dengan politik dan pemerintahan. Pusat pemerintahan tidak hanya berfungsi sebagai pusat ruang kota, tetapi juga sebagai pusat kegiatan suatu kota atau bahkan suatu negara.

Kantor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kantor adalah balai (gedung,

rumah, ruang) tempat mengurus suatu pekerjaan (perusahaan dan sebagainya). Menurut Sedarmayati, kantor adalah tempat dimana berbagai aktivitas pengelola informasi terjadi, meliputi penerimaan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan distribusi informasi. Sementara itu, Prajudi Atmosudirjo mengatakan, Kantor adalah unit organisasi yang terdiri dari lokasi, staf, dan kegiatan administrative untuk mendukung pekerjaan pimpinan(KBBI, 2024b).

Kantor juga dapat diartikan sebagai tempat atau ruangan dan proses kegiatan penanganan data/informasi. Kantor dapat dirumuskan sebagai tempat dan proses penyelenggaraan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, dan pendistribusian data/informasi.(M A N A J E M E N P E R K A N T O R A N M O D E R N, n.d.)

Mal

Mal adalah tempat untuk kegiatan pertukaran dan distribusi barang atau jasa yang memiliki sifat komersial, serta melibatkan perencanaan dan perancangan yang teliti dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Mal merupakan kompleks perbelanjaan yang dirancang secara terencana dan dikelola secara terpusat. Unit-unit di dalamnya disewakan kepada pedagang individu, sementara pengelolaan serta pengawasannya dilakukan oleh pihak pengelola yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasional. Mal juga diartikan sebagai Kumpulan pusat perdagangan yang dibangun di Lokasi yang telah direncanakan dan dikembangkan secara terpadu.

Pelayanan Publik

Secara etimologis, pelayanan dapat diartikan sebagai “Upaya untuk memenuhi kebutuhan orang lain “. Istilah publik sendiri berasal dari Bahasa Inggris “*public*,” yang berarti umum, masyarakat luas, atau rakyat. Menurut para ahli seperti Syafie dkk, publik merupakan sekelompok individu yang memiliki kesamaan dalam pemikiran, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik, berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka anut.

Pelayanan publik adalah semua aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk emenuhi kebutuhan penerima layanan serta untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pelayanan Publik adalah setiap aktivitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik bertujuan untuk memenugi kebutuhan masyarakat serta menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku(I Dewa Gede Soni Aryawan ATD, 2020)

Mal Pelayanan Publik

Mal Pelayanan Publik adalah tempat dimana berlangsungnya kegiatan atau aktifitas untuk menyelenggarakan pelayanan publik terkait barang, jasa, dan/atau administrasi, yang merupakan pengembangan fungsi pelayanan terpadu baik di Tingkat pusat maupun daerah, termasuk pelayanan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau swasta, dengan tujuan menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.(*Pengertian 22*, n.d.)

Mal Pelayanan Publik juga dapat diartikan suatu Gedung yang mewadahi integrasi pelayanan kewenangan pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, BUMN / BUMD serta swasta. (situsmenpan.go.id). Mal Pelayanan Publik adalah lokasi yang menyelenggarakan berbagai layanan barang, jasa dan administrasi. Tempat ini berfungsi sebagai perluasan dari pelayanan terpadu, baik di Tingkat pusat, daerah, maupun swasta, untuk memberikan pelayanan yang cepat dan mudah di akses.

Teori Sirkulasi Kantor

Sirkulasi merupakan suatu pola lalu lintas atau pola pergerakan yang terdapat dalam suatu area atau bangunan (Harris, 1975:212). Sirkulasi berperan sebagai jalur pergerakan yang memiliki pengaruh pandangan terhadap bentuk dan ruang bangunan-bangunan. Sirkulasi harus mengakomodir pergerakan manusia ketika berjalan, berhenti, beristirahat, atau menikmati pemandangan di sepanjang jalan (Ching,2007:282).

Teori Pemilihan Warna

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Warna adalah kesan yang diperoleh mata dari cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang dikenainya(KBBI, 2024b). Secara obyektif atau fisik definisi warna ialah sifat cahaya yang dipancarkan. Sedangkan secara subyektif atau psikologi definisi warna merupakan bagian dari pengalaman indra penglihatan(Warna (*Definisi, Unsur, Jenis Dan Psikologi*), 2023).

Menurut Syafiqah Nur Fadiah dan Satriadi warna adalah Bahasa tubuh mereka yang mampu menyampaikan pesan dengan cepat(Desain et al., n.d.). Menurut Thejahanjaya dan Yulianto (2022), warna ialah elemen penting dalam komunikasi visual, berfungsi sebagai symbol yang dapat mempengaruhi emosi dan perilaku manusia. Sedangkan menurut Handayani (2024) Warna dianggap sebagai elemen terapeutik yang dapat mempengaruhi suasana hati dan emosi.

Transparent Office

Pendekatan *Transparent office* ialah pendekatan yang melibatkan integrasi elemen fisik dan budaya organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang terbuka, efisien, dan kolaboratif. Pendekatan *Transparent Office* ini relevan diterapkan di kantor pemerintahan karena sejalan dengan prinsip-prinsip dasar tata kelola kantor yang baik, yaitu akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi publik. Dengan kantor yang terbuka mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan yang jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan material transparan seperti kaca dan tata ruang terbuka tidak hanya menciptakan kesan modern, tetapi juga menjadi symbol keterbukaan informasi dan akses yang mudah bagi masyarakat.

Dari sisi akuntabilitas, ruang kerja yang transparan memungkinkan proses kerja antar pegawai dapat terlihat dengan jelas, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Efisiensi juga dapat tercapai melalui pengoptimalan tata

ruang yang fleksibel dan minim sekat, sehingga alur komunikasi dan koordinasi antar bagian menjadi lebih lancar dan responsive.

Desain terbuka mendorong partisipasi publik. Ruang layanan yang dirancang terbuka dan ramah membuat masyarakat merasa lebih diterima dan nyaman dalam mengakses layanan. Informasi yang disajikan secara terbuka melalui papan digital atau ruang konsultasi yang mudah diakses akan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pelayanan publik. Hal ini secara tidak langsung memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun kepercayaan serta menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan transparan di internal organisasi.

METODE PENELITIAN

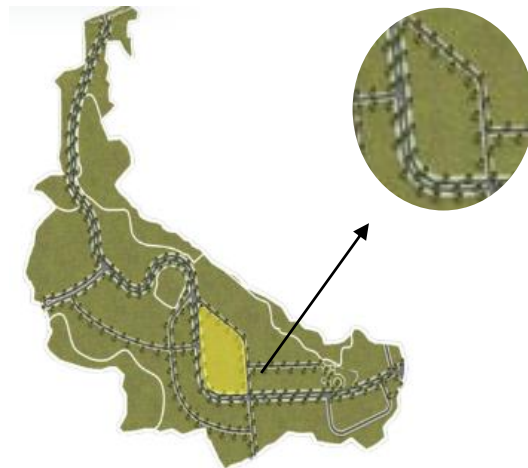
Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis perancangan Blok E (Mal Pelayanan Publik dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) dengan Pendekatan *Transparent Office* di Pusat Pemerintahan Agam Tuo Nagari Balingka adalah metode Kualitatif. Proses penelitian ini dilakukan secara bertahap, yaitu sebagai berikut:

1. **Wawancara**, Melakukan wawancara dengan salah satu kepala bidang di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Agam dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai Daerah Otonomi Baru.
2. **Survey Lapangan (Observasi)**, Melakukan kunjungan ke lokasi penelitian guna untuk mengumpulkan data eksisting tapak saat ini.
3. **Studi Literatur**, Mencari literatur judul terkait judul penelitian di berbagai jurnal, buku, peraturan, undang-undang, dan berita-berita ang relevan.
4. **Studi Preseden**, Melakukan analisis preseden bangunan unutm memahami konsep, struktur, dan aktivitas yang terkait dengan judul penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi

Pusat pemerintahan Kabupaten Agam Tuo berada di Jl. Sicincin, Malalak, dan Balingka, Kecamatan IV Koto, dengan total luasan $\pm 13.072,40 \text{ m}^2$.



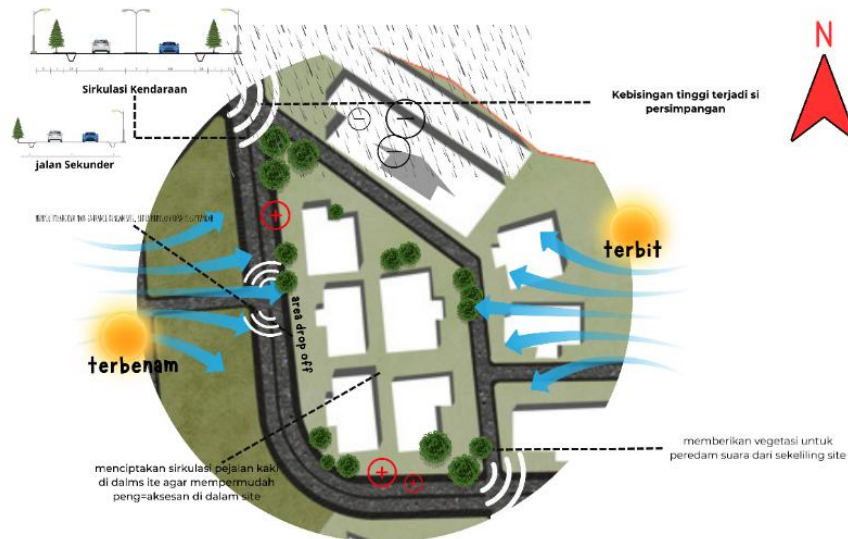
Gambar 1. Lokasi Tapak
Sumber : Data Penulis, 2024

Batasan Tapak

- a. Utara : Jl. Sekunder dan hunian vertical ASN
- b. Selatan : Jl. Primer dan Dinas Perhubungan
- c. Barat : Jl. Sekunder dan Gedung Perkantoran
- d. Timur : Jl. Primer

Analisa Ruang Luar dan Data Tapak

Visualisasi hasil analisa tapak dituangkan dalam bentuk superimpose, agar dapat melihat dengan bersamaan potensi-potensi yang ada pada site.



Gambar 2. Superimpose
Sumber : Data Penulis, 2024

Analisa ruang luar diatas yang dituangkan dalam bentuk superimpose itu meliputi, analisa kebisingan, view, iklim, sirkulasi, fisik alami, fisik buatan, utilitas, serta analisa manusia dan budaya sekitar tapak.

Tabel 1.1 Analisa Ruang Luar

Aspek	Masalah / Tantangan	Solusi / Alternatif
View	Arah view site, gedung perkantoran (barat, timur, dan selatan), dan hunian vertical (utara)	Orientasi massa ke 3 view yang dapat dijadikan penunjang.(barat, timur, dan selatan)
Kebisingan	Kebisingan tinggi berasal dari arah utara, dimana itu berasal dari persimpangan 4	Memberikan vegetasi peredam suara, dan memposisikan bangunan jauh dari pusat kebisingan
Matahari	Panas berlebih di siang hari, barat-timur rawan radiasi langsung.	Bukaan di utara-selatan, secondaryskin timur-barat, dan menggunakan pohon pelindung.
Aksesibilitas	Ada 2 akses jalan (sekunder, dan primer)	Entrance sign, pisahkan pintu masuk-keluar dan akses service.
Sirkulasi	Akses jalan terdapat 2 utama, dan tidak adanya jalan dalam site	Pisahkan jalur kendaraan dan pejalan, buat pedestrian aman dan nyaman.
Vegetasi	Vegetasi tidak teratur (karena hutan), banyaknya pohon- pohon besar	Mempertahan vegetasi yang bisa di pertahankan, dan merambah vegetasi yang dapat menghambat potensi site
Utilitas	Belum ada perencanaan utilitas	Menggunakan sitem utilitas underground dan menggunakan drainase tipe tertutup
Aspek	Masalah / Tantangan	Solusi / Alternatif
Angin	Angin di daerah perbukitan cukup kuat	Vegatasi pengarah angin, dan memposisikan bangunan agar bisa menangkap angin agar masuk ke bangunan

Sumber : Analisa Penulis, 2024

Berdasarkan tabel analisa ruang luar diatas, permasalahan- permasalahan yang ada pada tapak dapat diselesaikan dengan baik. Tergantung bagaimana kita mengimplementasikannya. Alternatif yang digunakan dapat memberikan solusi pada permasalahan yang ada pada site.

Analisa Ruang Dalam

1. Pelaku, Aktivitas, dan Fungsi

Blok E di Pusat Pemerintahan Baru Kabupaten Agam Tuo, direncanakan akan dibangun, **Mal Pelayanan Publik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Inspektorat, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan. Tetapi, Perancangan Blok E yang dirancang kali ini hanya terfokus pada gedung Mal Pelayanan Publik dan gedung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dimana jenis kantor ini memiliki fungsi dan juga aktivitas yang berbeda di dalamnya.

a. Pelaku Mal Pelayanan Publik

Kepala Pengelola, Staf Koordinator Operasional, Staf Administrasi Umum, Teknisi / Staf IT, Customer Service, Frontline, Back Office, Kepala Perpustakaan, Pustakawan, Staf Administrasi, Teknisi IT Perpustakaan, Cleaning Service

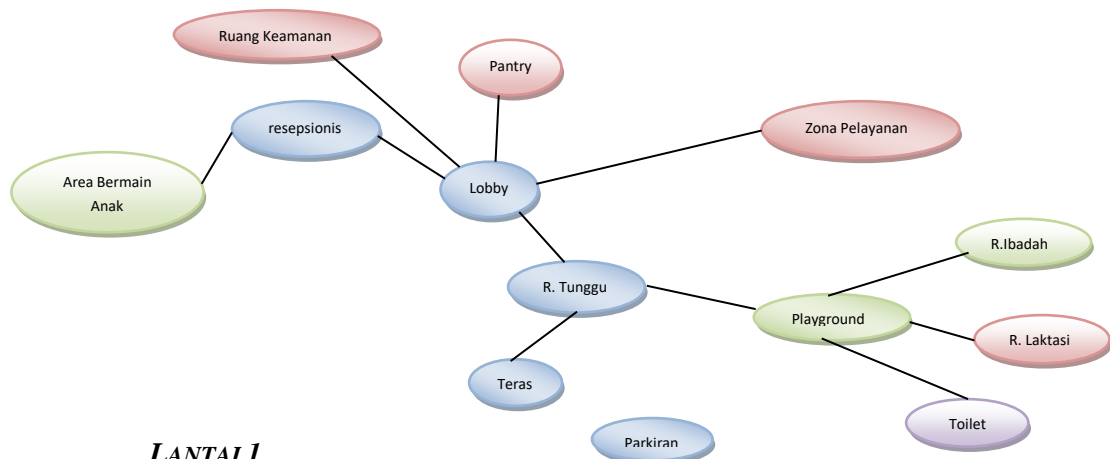
Perpustakaan, Pengunjung (Tenaga Pendidik, Mahasiswa / Siswa , anak – anak, dan masyarakat umum).

- b. Pelaku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kepala Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional, Sekretaris, Kepala Sub. Bidang, Kepala Bidang, Analisator.

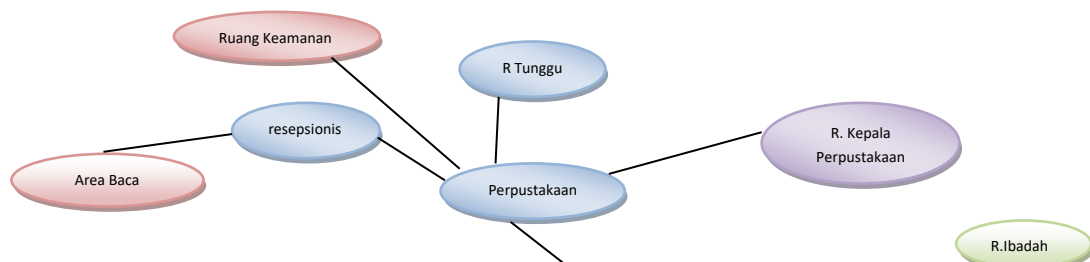
Fungsi dari kedua gedung ini tentu berbeda, pada Mal Pelayanan Publik terdapat ada 16 layanan yang dapat di lakukan, antara lain : layanan administrasi pemerintah, layanan kepolisian, layanan pengadilan dan hukum, layanan perpajakan, layanan Kesehatan dan ketenagakerjaan, layanan pertanahan, layanan social dan ketenagakerjaan, layanan perbankan dan keuangan, layanan perizinan dan non perizinan, layanan pendafatran nikah, layanan kesehatan dan pendidikan, layanan udaha dan perdagangan, layanan transportasi dan perhubungan, dan laynan fasilitas pendukung publik lainnya. Sedangkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki fungsi yaitu untuk membantu kepala daerah dalam urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politi atau juag dapat dikatakan, gedung ini berfungsi untuk menjaga stabilitas politik dan ketahan ideologi, demokrasi, serta untuk mwujudkan kurukunan masyarakat yang berada di daerah.

Konsep

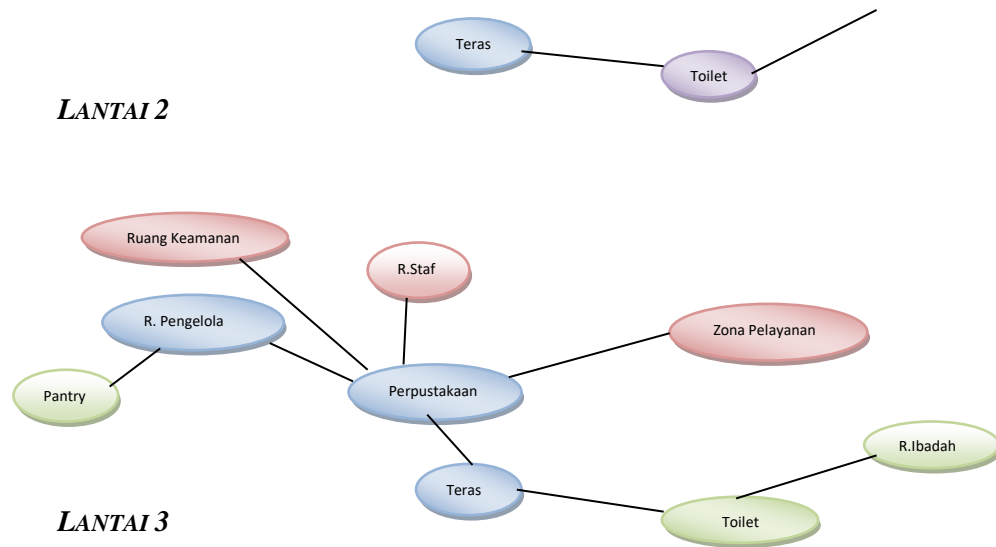
Pada Perancangan sesuatu dimulai dengan proses analisa makro dan juga mikro dari site yang dipilih,



LANTAI I

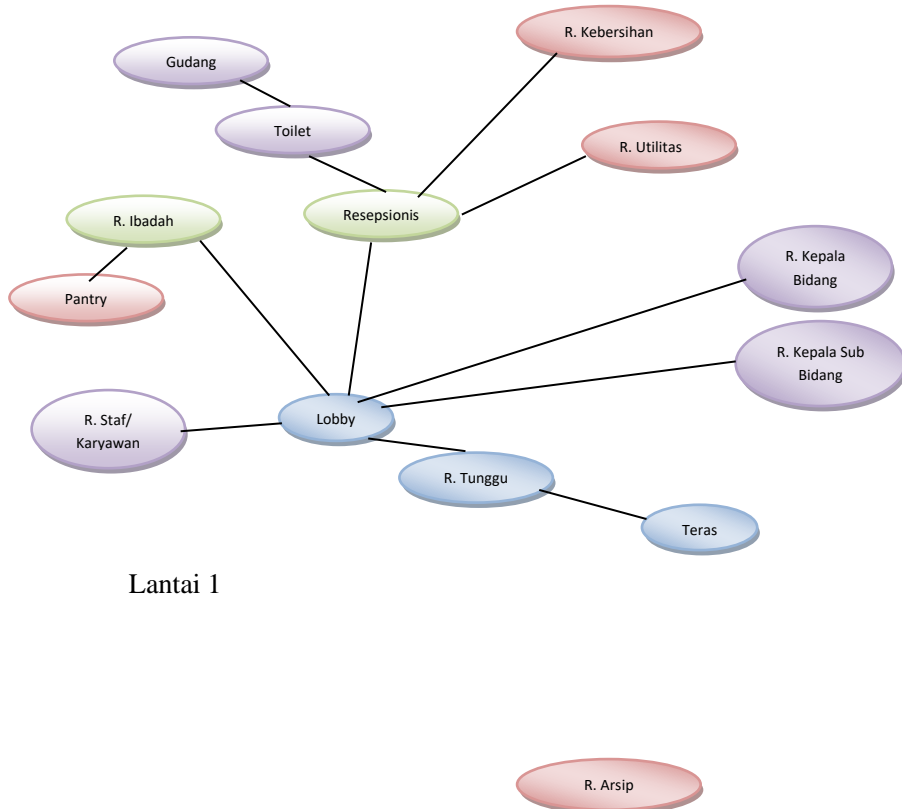


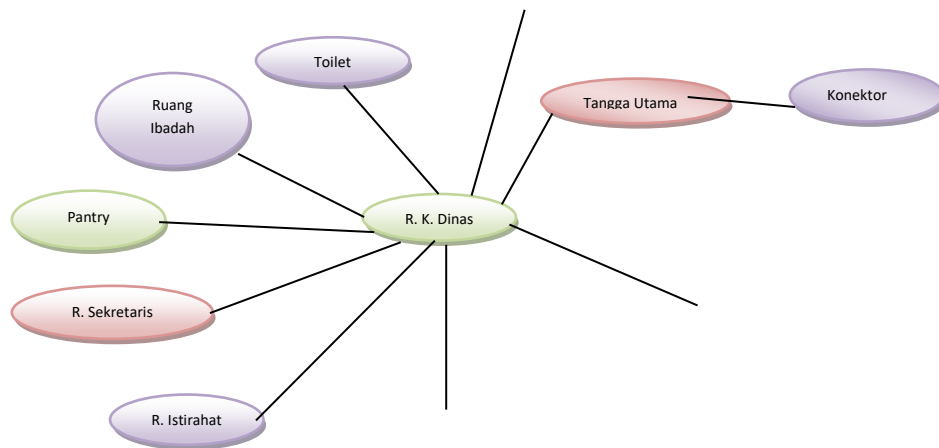
LANTAI 2



Gambar 3. Zoning Mikro Mal Pelayanan Publik
Sumber : Data Penulis,2024

Lantai 1





Gambar 4. Zoning Mikro Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sumber: Penulis, 2024

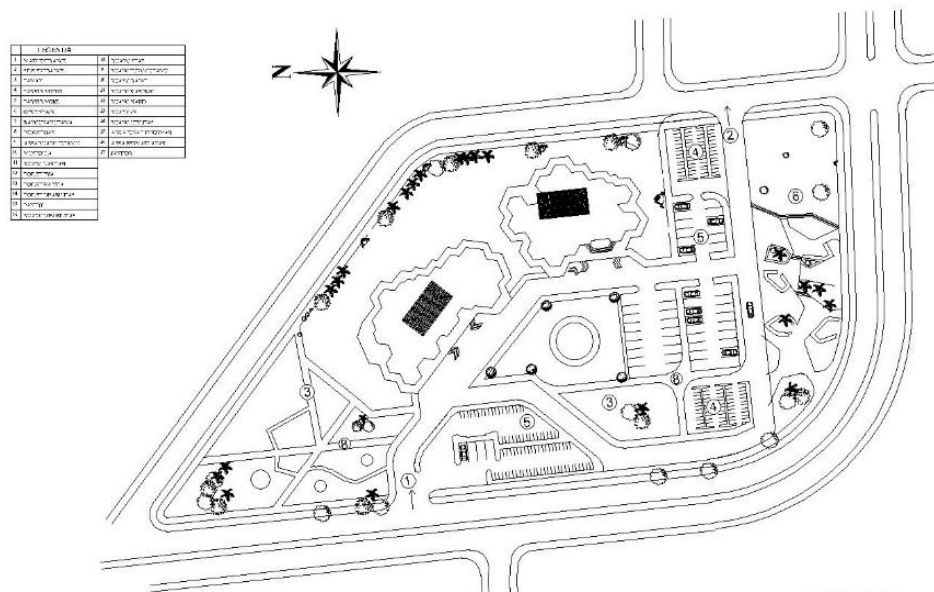
Gambar diatas merupakan, zoning mikro dari gedung Mal Pelayanan Publik dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, ini merupakan tahapan proses sampai akhirnya sampai pada tahap pengembangan desain dan konsep bentuk masa bangunan. Konsep bentuk tapak bangunan perancangan ini, diambil dari konsep biomimikri, dimana dalam penghasilan bentuk massanya menggunakan transformasi dari buah strawberry, dimana ini merupakan salah satu mata pencaharian terbesar masyarakat yang berada di sekitar site.

Implementasi

Blok Plan

Implementasi analisa ruang luar terhadap blok plan, jenis atap yang digunakan ialah jenis atap pelana dengan menggunakan kemiringan atap 30 derajat. Menggunakan atap dengan kemiringan 30 derajat itu mempertimbangkan teknis, iklim dan juga estetikanya. Dengan kemiringan 30 dapat mempercepat air hujan mengalir agar tidak adanya genangan di atap, dan juga dengan kemiringan ini dapat mengurangi resiko kebocoran karena tidak mudahnya masuk air di celah- celah bubungan, dengan ini dalam perawatannya material atap juga dapat bertahan lebih lama.

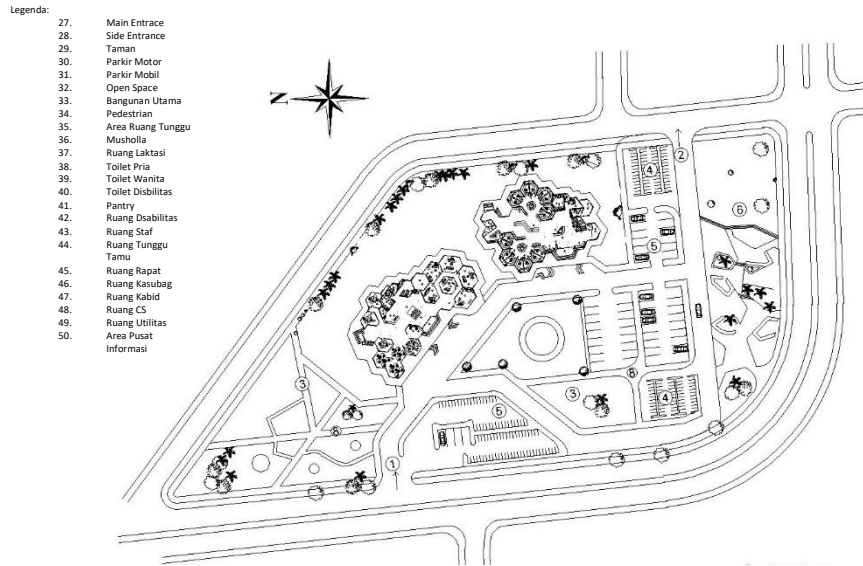
Legenda:	
1.	Main Entrance
2.	Side Entrance
3.	Taman
4.	Parkir Motor
5.	Parkir Mobil
6.	Open Space
7.	Bangunan Utama
8.	Pedestrian
9.	Area Ruang Tunggu
10.	Musholla
11.	Ruang Laktasi
12.	Toilet Pria
13.	Toilet Wanita
14.	Toilet Disabilitas
15.	Pantry
16.	Ruang Disabilitas
17.	Ruang Staf
18.	Ruang Tunggu Tamu
19.	Ruang Rapat
20.	Ruang Kasubag
21.	Ruang Kabid
22.	Ruang CS
23.	Ruang Utilitas
24.	Area Pusat Informasi
25.	Area Bermain Anak
26.	Janitor



Gambar 5 . Blok Pan
Sumber: Penulis,2025

Site Plan

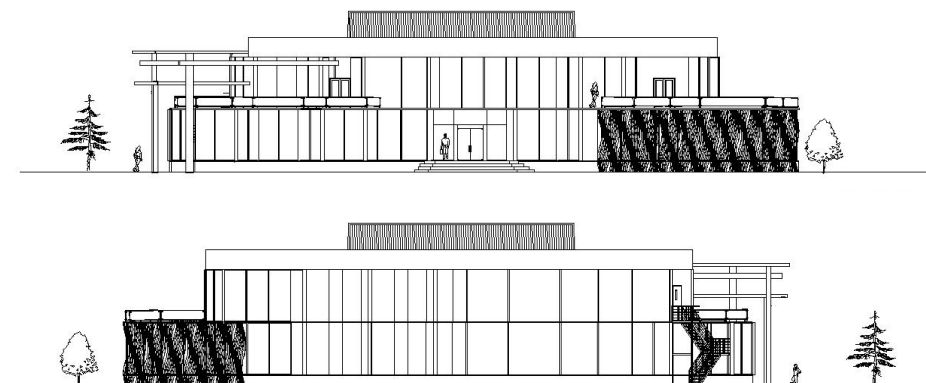
Implementasi analisa ruang luar dan juga desain kepada site plan dapat dilihat pada gambar di bawah, dengan luasan site plan yang lebih kurang 13.072,40 m² cukup representatif untuk menampung sebuah fungsi gedung pemerintahan terpadu. Site berada di jalur strategis dimana terletak dipusat pemerinthan. Kondisi tapak memiliki kontur yang terbilang landai sehingga memudahkan dalam perencanaannya..BVegetasi eksisting Sebagian besar semak belukar karena iste merupakan lahan hutan yang belum terbangun. Dari aspek iklim, orientasi bangunan mengarah ke barat – timur, ini guna untuk agar bangunan dapat menanggapi cahaya matahari dengan maksimal, hal ini memunculkan desain agar menggunakan secondary skin pada fasade bangunan. Pada site are parkir terletak di depan dan juga di samping bangunan, sedangkan pada site terdapat area buffer zone (area dilarang / tidak bisa terbangun) yaitu berada di bagian selatan site, hal ini dimanfaatkan untuk area ruang terbuka hijau yang sedikit didesain menyerupai terasering yang landai.



Gambar 6. Site Plan
Sumber: Penulis 2025

Tampak

Pengimplementasian desain pada tampak bangunan dengan pendekatan transparant office yang diwujudkan melalui dominasi material kaca pada fasad. Pada tampak hal ini menghadirkan kesan keterbukaan dan kemudahan akses bagi masyarakat. Untuk level bangunan sendiri dibikin bertingkat dalam estetikanya bangunan kantor ini tidak monoton dan menarik untuk dilihat. Tampak bangunan ini menggunakan dominaasi kaca vertical, sedangkan elemen dinding massif sebagai penyeimbang untuk menghadirkan kesan yang kokoh dan tegas sebagai sebuah gedung perkantoran. Selain itu fasade bangunan juga mengimplementasikan sentuhan tradisional, dimana fasade dari bangunan ini merupakan transformasi dari liukan batik pucuk pakis, dengan material mengggukan aluminum guna untuk dapat dijadikan vertical garden juga dapat menjadi penangkap, pengarah dan juga pemecah angin yang ingin masuk ke dalam bangunan.



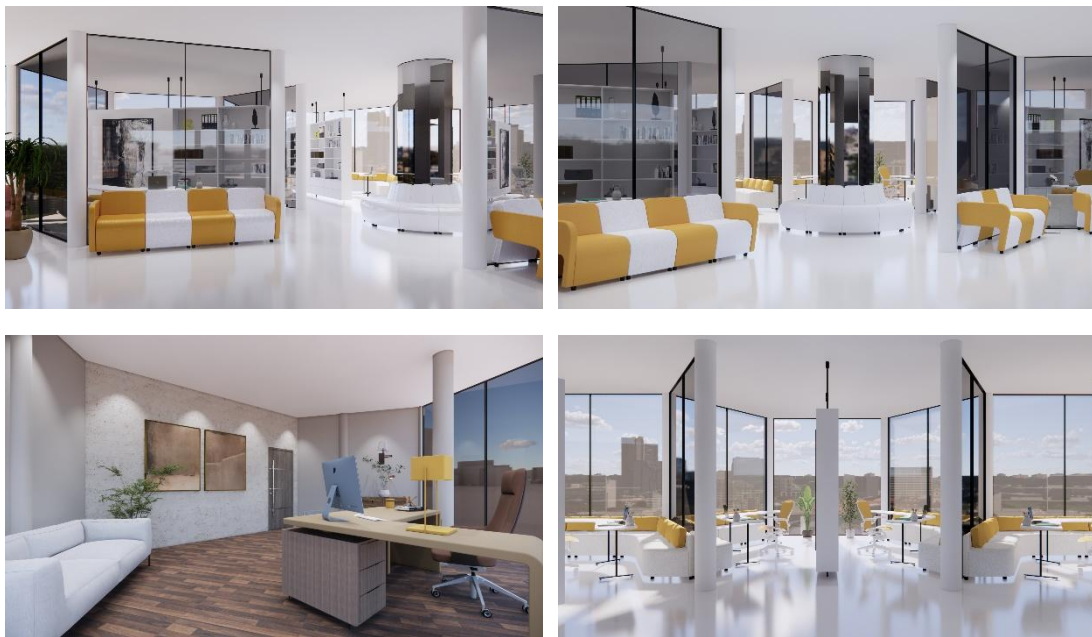
Gambar 7. Tampak
Sumber: Penulis, 2025

Interior

Pengimplementasian pendekatan transparant office pada interior bangunan dapat dilihat pada jenis material yang digunakan. Material kaca yang digunakan itu memungkinkan cahaya alami masuk secara optimal ke dalam bangunan. Penggunaan pembatas partisi juga merupakan pengvisualan konsep transparant office yang digunakan, dengan itu modular ruang dapat berubah sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Penggunaan material kaca juga dapat meminimalisir penggunaan pencahayaan buatan pada siang hari.

Pemilihan warna kuning interior bangunan menggambarkan kesan yang segar, dinamis, semangat, kreatif, dan memiliki jiwa optimis, ini dapat memberikan energi positif bagi mata yang memandangnya. Sedangkan warna putih menggambarkan bersih, professional, transparan dan netral hal ini menimbulkan kesan kantor terasa lebih lapang dan luas.

Secara keseluruhan, desain interior pada bangunan ini menghadirkan kesan terbuka, ramah dan juga inklusif, sehingga dapat di nikmati oleh mata yang memandangnya dan nyaman bagi orang yang menggunakannya, baik dari anak-anak sampai lansia.



Gambar 8. Interior
Sumber: Penulis, 2025

Eksterior

Pengimplementasian eksterior pada bangunan gedung perkantoran, dapat dilihat pada fasadenya / secondary skinnya menggunakan material aluminum, dengan adanya tambahan desain fasade pengganti atap pada outdoor lantai 2nya.



Gambar 9. Eksterior
Sumber: Penulis, 2025

KESIMPULAN

Perancangan Blok E di pusat pemerintahan Kabupaten Agam didasari oleh kebutuhan fasilitas pemerintahan terpadu akibat pemekaran wilayah. Blok ini menampung fungsi Mal Pelayanan Publik dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam satu kawasan yang terintegrasi. Konsep *transparent office* dipilih untuk mengubah citra kantor pemerintahan yang selama ini terkesan tertutup menjadi lebih terbuka, inklusif, komunikatif, dan ramah bagi masyarakat.

Proses perancangan dilakukan melalui analisis tapak, kebutuhan ruang, sirkulasi, struktur, dan utilitas bangunan. Desain menggabungkan ruang publik dan privat dengan struktur utama bore pile dan beton bertulang, serta dilengkapi utilitas underground yang mencakup listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sistem proteksi.

Hasil perancangan menunjukkan bahwa penerapan *transparent office* tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kenyamanan kerja pegawai, tetapi juga berfungsi sebagai ruang interaksi masyarakat yang sehat dan terbuka. Dengan demikian, gedung ini mampu mewadahi fungsi administrasi sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui arsitektur yang lebih partisipatif dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agam Dimekarkan, Agam Tuo Bakal Jadi Kabupaten.* (2024, March 19). Sumbarsatu.Com. <https://sumbarsatu.com/berita/30975-agam-dimekarkan-agam-tuo-bakal-jadi-kabupaten>
- Daerah Otonomi Baru (DOB) Kab Agam.* (n.d.).
- Desain, J., Visual, K., Seni, F., Desain, D., & Makassar, U. N. (n.d.). PERAN WARNA DALAM MENINGKATKAN DAYA TARIK VISUAL LOGO Syafiqah Nur Fadiah dan Satriadi. *PARATIWI: Jurnal Seni Rupa Dan Desain*, 3.
- Fitria, Y., & Putera, R. E. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA PAYAKUMBUH. *Journal Publicuho*, 7(3), 1237–1250. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.483>
- I Dewa Gede Soni Aryawan ATD, M. Eng. S. (2020). *mal pelayanan publik dan standar pelayanan publik*. MediaNusaCerative.
- Luvita, A. (2019). *BAB II.*
- MANAJEMEN PERKANTORAN MODERN.* (n.d.). *Pembentukan DOB Kabupaten Agam Tuo: Langkah Maju Menuju Pelayanan Publik yang Lebih Efektif.* (2024, May 5). Pasbana. pengertian 22. (n.d.). http://36.95.239.66/1141/9/Bab2_D1031161037.pdf
- Shabrina Alfari. (n.d.). *Kawasan Pusat Pemerintahan.* Arsitag. <https://www.arsitag.com/article/kawasan-pusat-pemerintahan>
- Tim Hukumonline. (2022, September 10). *Daerah Otonom dan Perbedaanya dengan Otonomi Daerah.* HukumOnline.Com.
- Tulisan-Hukum-PEMBENTUKAN-DAERAH-OTONOMI-BARU.* (n.d.). <https://www.scribd.com/document/818981839/Tulisan-Hukum-PEMBENTUKAN-DAERAH-OTONOMI-BARU-1>
- Warna (Definisi, Unsur, Jenis dan Psikologi).* (2023, April 13). KajianPustaka.

W